



Kacamata Driyarkara adalah program kerja Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma 2020 berupa kajian yang berisi pemikiran-pemikiran atas isu-isu kontemporer baik di bidang politik, hukum, pendidikan, sosial, maupun ekonomi dari perspektif BEM USD. Selamat membaca!

Kacamata Driyarkara:

Suara dari BEMU Sanata Dharma: Refleksi Satu Tahun

Kepemimpinan Joko Widodo - Ma'ruf Amin

Louis IX King

Kasiano Vitalio

Ronaldo C.P Turnip

Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020

Pada tanggal 20 Oktober yang lalu, genaplah satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berjalan. Sebulan sebelum mereka dilantik, pada September 2019 lalu terjadi demo besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia. Demonstrasi tersebut menuntut penolakan terhadap revisi UU KPK, mendukung pengesahan RUU-PKS sampai penolakan terhadap RKUHP. Demo yang terjadi di berbagai daerah tersebut juga tercatat setidaknya 232 orang menjadi korban pada

25 September 2019 lalu di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Sumatera Selatan hingga Sulawesi Selatan.

Setelah setahun berlalu, kami mengajak Anda untuk melihat data mengenai tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma'aruf, melalui survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Review (IPR). Survei tersebut menunjukkan bahwa 43,7 persen (gabungan sangat puas dan puas) publik mengatakan puas dengan kinerja dari Jokowi-Ma'aruf, sedangkan 51,3 persen (gabungan tidak puas dan sangat tidak puas) menunjukkan bahwa publik tidak puas. Persentase ketidakpuasan publik yang lebih banyak dibandingkan kepuasan publik dapat menjadi tanda bahwa pemerintah saat ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau menepati janji-janji yang mereka berikan saat kampanye.

Janji Kampanye Jokowi-Maruf dalam Pertarungan Pilpres 2019

Pada ajang kontestasi pilpres 2019, pasangan pilpres Jokowi-Ma'aruf Amin keluar sebagai pemenang mengungguli penantang mereka, yakni Prabowo-Sandi. Berikut ini 10 janji Jokowi-Ma'aruf:

1. Kemiskinan turun dan kartu sembako murah
2. Klaim jaminan pendidikan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
3. Program Mekaar dan UMI (Pembiayaan Ultra Mikro)
4. Sertifikasi tanah dan konsesi lahan
5. Dana desa akan capai Rp 400 Triliun
6. Koperasi petani dan bank mikro nelayan
8. Kartu Pra-Kerja
9. Permudah usaha generasi muda

10. Akses internet cepat¹

Satu tahun berlalu, tetapi masyarakat kecil menilai Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak memberikan sama sekali perbaikan ekonomi hingga setahun masa jabatan keduanya. Memang, ada pandemi Covid-19 dalam sembilan bulan terakhir. Masalahnya, pemerintah malah menerbitkan kebijakan kontroversial, seperti Omnibus Law, alih-alih fokus pada penanganan pandemi secara langsung oleh Pusat.

Junaedi (40), warga Cianjur yang bekerja sebagai penjual gorengan di Jakarta Selatan, mengatakan dalam setahun ini keuangannya justru makin seret. Padahal, pada Pilpres 2019 ia mencoblos Jokowi karena janji-janjinya yang tampak hendak memberi kemudahan untuk rakyat, misalnya kartu sehat, kartu prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar. "Waduh, setahun terakhir mah justru pailit, enggak ada seneng-senengnya, ampun saya," cetus dia, ditemui di lokasi jualannya, Senin (19/10). "Padahal dulu saya milih karena katanya bisa gampang kalau berobat, bisa dapet kerja, sekarang malah enggak ada bedanya, istilahnya saya cuman makan janji, yang ada makin sulit," tuturnya.²

Selain itu, selama satu tahun memerintah, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin juga masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menjawab aspirasi, keresahan, dan juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Inventarisasi Masalah selama Pemerintahan Jokowi-Maruf

Berikut adalah beberapa isu-isu dan permasalahan yang menurut tim pengkaji belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh Kabinet Indonesia Maju yang dinakhodai oleh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin:

¹ Tribun News, "Catat, 10 Janji yang Pernah Diucapkan Jokowi-Ma'ruf Jika Terpilih Pimpin Indonesia 2019-2024", diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/01/catat-10-janji-yang-pernah-diucapkan-jokowi-maruf-jika-terpilih-pimpin-indonesia-2019-2024> pada 27 Oktober 2020 pukul 17.50 WIB

² CNN Indonesia, "Setahun Jokowi-Ma'ruf di Mata Warga: Ampun, Cuma Makan Janji", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201020073512-20-560315/setahun-jokowi-maruf-di-mata-warga-ampun-cuma-makan-janji> pada 27 Oktober 2020 pukul 18.55 WIB

a. Demokrasi Jalan di Tempat

Baru-baru ini, Lembaga survei Indikator Politik merilis survei terkait pandangan masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat. Mayoritas responden mengatakan ada ketakutan mengeluarkan pendapat saat ini. Sebanyak 69,6 persen responden (setuju dan agak setuju) menyatakan bahwa warga masyarakat makin takut mengeluarkan pendapat.

Survei ini dilakukan pada 24-30 September 2020. Dengan total responden 1.200 orang yang dipilih secara acak. Metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan *margin of error* sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.³

b. Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan kualitas pendidikan antara Jawa dan luar Jawa, terutama Indonesia bagian timur ini bukan hal baru, sudah terjadi sejak Indonesia merdeka, tapi belum pernah terpecahkan. Kesenjangan bukan hanya menyangkut kualitas pembelajaran, tapi fisik (gedung dan peralatan) pun senjang.

Masalahnya kompleks. Tidak hanya tergantung pada kinerja satu kementerian yang mengurus pendidikan saja (Kemdikbud, Kemenristek Dikti, dan Kemenag), tapi juga kementerian-kementerian lain yang menyediakan infrastruktur jalan, transportasi, bangunan, listrik, dan telekomunikasi. Kesemuanya itu kait mengkait; tidak berdiri sendiri.

Awal kesenjangan itu dimulai ketika infrastruktur (segalanya) di luar Jawa amat buruk, sehingga para guru/dosen yang ditempatkan di sana -terlebih di Indonesia bagian timur- banyak yang tidak betah tinggal di sana. Setelah memenuhi syarat bisa pindah (dua tahun setelah jadi PNS), mereka kemudian minta pindah ke Jawa atau pindah ke perkotaan.

³ Eva Safitri, "Survei Indikator: Mayoritas Responden Takut Nyatakan Pendapat Saat Ini", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5228103/survei-indikator-mayoritas-responden-takut-nyatakan-pendapat-saat-ini>, pada 26 Oktober 2020 pukul 22.03 WIB

Itu terjadi terus menerus selama puluhan tahun, sehingga akhirnya di luar Jawa selalu kekurangan guru/dosen yang berkualitas sampai sekarang. Sementara di Jawa selalu kelebihan guru/dosen.⁴

Ketimpangan dalam akses pendidikan sangat dirasakan saat pandemi. Ini bukan cerita baru lagi: para siswa, orangtua, dan guru jungkir balik mengikuti proses belajar jarak jauh via daring selama pandemi COVID-19. Di daerah-daerah terluar dari pusat kekuasaan, bahkan sekalipun di dekat pusat wisata terkenal di Indonesia, para murid harus mencari cara yang tak masuk akal demi mendapatkan sinyal internet. Di tempat lain, ada keluarga-keluarga yang tak punya ponsel sama sekali; ada juga yang bergantian memakai satu ponsel milik orangtuanya. Dan, sekalipun mudah mendapatkan akses internet dan punya ponsel, banyak keluarga yang kerepotan membeli kuota, di saat ekonomi keluarga tergulung pagebluk.

Hasil riset dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, yang dirilis pada 21 Agustus lalu, menjelaskan ketimpangan nyata di dunia pendidikan Indonesia selama musim pandemi Covid-19. Hampir 69 juta siswa kehilangan akses pendidikan dan pembelajaran saat pagebluk. Namun, di sisi lain, banyak kelompok siswa dari keluarga mapan lebih mudah belajar jarak jauh. Ini implikasi dari ketimpangan, tulis riset itu. Riset itu mendapati hanya 40% orang Indonesia memiliki akses internet. Ia makin membuka tabir ketimpangan infrastruktur komunikasi, khususnya di luar Pulau Jawa.⁵

c. Isu Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik lahan era Presiden Joko Widodo meningkat hampir dua kali lipat dibanding dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berdasar catatan KPA, selama periode pemerintahan pertama Jokowi 2015-2019 telah terjadi 2.047 kasus, sedangkan semasa era SBY pada 2010-2014 ada 1.308 konflik.

⁴ Darmaningtyas, "Kesenjangan kualitas pendidikan Jawa - luar Jawa", diakses dari <https://beritagar.id/artikel/telatah/kesenjangan-kualitas-pendidikan-jawa-luar-jawa-pada-26-oktober-2020>, pukul 23.33 WIB

⁵ Haris Prabowo, "Pandemi COVID-19 Menunjukkan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia", diakses dari <https://tirto.id/pandemi-covid-19-menunjukkan-ketimpangan-pendidikan-di-indonesia-f34d>, pada 26 Oktober 2020 pukul 23.30 WIB

Di periode pertama Jokowi, sektor perkebunan penyumbang konflik tertinggi, yaitu 729 kasus. Diikuti sektor properti 499 kasus, pertanian 145 kasus, kehutanan 118 kasus, pertambangan 117 kasus, pesisir dan pulau-pulau kecil 60 kasus serta, fasilitas militer 10 kasus. Sementara konflik lahan akibat pembangunan infrastruktur meningkat drastis di era Jokowi. Bila pada 2018 ada 16 kasus, setahun berikutnya bertambah menjadi 83 kasus. Paling banyak terkait pembangunan fasilitas umum yakni 28 kasus. Diikuti proyek fasilitas sosial sebanyak 13 kasus dan pembangunan jalan tol terdapat 11 kasus.

Rencana pembangunan infrastruktur jumbo pada lima tahun mendatang diduga juga akan mengakibatkan konversi lahan besar-besaran. Sebelum meneruskan proyek-proyek agraria, pemerintah semestinya mencermati kasus-kasus pertanahan yang lima tahun belakangan masih bergejolak.⁶

Data YLBHI menunjukkan, selama 2018, 300 kasus konflik struktural agraria di 16 provinsi yang ditangani kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dengan luasan lahan 488.404,77 hektare telah mengakibatkan 367 pelanggaran HAM di berbagai sektor. Konflik agraria struktural diakibatkan oleh penerbitan izin, keputusan, konsesi, di atas tanah masyarakat oleh pemerintah kepada para pengusaha.

Sampai Oktober 2019, konflik struktural agraria itu tak satu pun yang terselesaikan. Justru, pada 2019, kasus konflik agraria semakin bertambah. Perkara itu ditandai dengan masuknya kasus ribuan petani Jambi yang digusur lahan garapannya karena konflik agraria dengan anak perusahaan swasta.⁷

d. KARHUTLA

Sejak kebakaran dahsyat yang melenyapkan 2.611.411,44 hektar hutan dan lahan di Indonesia pada 2015, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memang berhasil ditekan, namun nahas tiga tahun berselang karhutla kembali membabi buta. Pada 2018, lebih dari 529 ribu hektar hutan

⁶ CNN Indonesia, "Konflik Lahan Era Jokowi 2 Kali Lipat dari 2 Periode SBY", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200106132321-20-462771/konflik-lahan-era-jokowi-2-kali-lipat-dari-2-periode-sby> , pada 26 Oktober 2020 pukul 22.43 WIB

⁷ Francisca Christy Rosana, "Pemerintahan Jokowi Jilid II, YLBHI: Konflik Agraria Masih Banyak", diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1262673/pemerintahan-jokowi-jilid-ii-ylbhi-konflik-agraria-masih-banyak> , pada 26 Oktober 2020 pukul 22.25 WIB

dan lahan terbakar, tiga kali lipat dari rekapitulasi luas karhutla pada 2017. Setahun setelahnya karhutla kembali menimpa seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta, menghanguskan 1,6 juta hektar hutan dan lahan. Jumlahnya bahkan melebihi akumulasi luas karhutla pada 2016-2018.

Kendati Februari 2020, Presiden Jokowi telah memberlakukan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 sebagai upaya penguatan pencegahan dan penegakan hukum dalam menanggulangi karhutla di Indonesia, karhutla kembali terjadi sepanjang tahun ini. Pantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperlihatkan hingga akhir September 2020, api telah membakar lebih dari 120 ribu hektar hutan dan lahan di 32 provinsi.

Enam provinsi langganan karhutla pun lagi-lagi tak bisa mengelak dari bencana klimatologi ini. BNPB merangkul, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, telah menerapkan status siaga darurat menyusul terjadinya karhutla di masing-masing provinsi. Di Riau, karhutla terpantau di sejumlah wilayah kabupaten, seperti Dumai, Bengkalis, Meranti dan Indragiri Hilir. KLHK mencatat, luas karhutla di provinsi ini telah mencapai 15 ribu hektar, lebih luas dari total karhutla di seluruh pulau Kalimantan yakni 12 ribu hektar. Sementara luas karhutla di Sumatera Selatan dan Jambi tergolong rendah, masing-masing berkisar 800 dan 500 ribu hektar.

Luas karhutla yang terjadi dari awal tahun hingga akhir September 2020 memang jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada periode Januari-September 2019, luas lahan dan hutan yang terbakar mencapai 857 ribu hektar. Pantauan satelit Aqua, Terra, NOAA20 dan SNPP yang dioperasikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) juga menunjukkan adanya penurunan jumlah sebaran titik panas atau hotspot selama Agustus-September tahun ini. Tak hanya itu, BMKG juga memprediksi adanya potensi La Nina yang mengakibatkan kenaikan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia saat musim hujan nanti.

Ini adalah angin segar mengingat hujan merupakan pahlawan dalam tragedi karhutla, namun Indonesia masih harus waspada melewati penghujung 2020. Pasalnya, data-data historis yang ada memperlihatkan puncak karhutla umumnya terjadi setiap Oktober, terlebih musim hujan 2020/2021 juga baru akan dimulai secara bertahap pada akhir Oktober. BMKG dalam *Press Release*-nya memperkirakan awal musim hujan di pulau Jawa, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi

berkisar pada Oktober-Desember sedangkan untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara dan Maluku baru akan mulai diguyur hujan pada November – Desember.⁸

e. Penyelesaian Permasalahan HAM di Masa Lalu

Pada awal periode pertamanya Jokowi sempat berjanji untuk menuntaskan permasalahan kasus HAM di Indonesia, Jokowi berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan HAM di masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen Jokowi tersebut juga tercantum dalam visi, misi dan program aksi yang dikenal sebagai Nawa Cita.⁹ Selanjutnya setelah periode pertama Jokowi selesai dan kemudian memutuskan untuk maju ke periode selanjutnya, Jokowi belum mampu menuntaskan pelanggaran HAM yang telah terjadi di masa lalu.

Pada periode kedua ini tidak lagi ada janji Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Namun Jokowi-Ma'aruf memiliki misi perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.¹⁰ Rasa aman yang ada dalam misi Jokowi tersebut menjadi tanda tanya bagi kita semua, di mana ketika Jokowi belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, kemudian bagaimana caranya Jokowi memberikan rasa aman bagi kita, ketika di luar sana masih banyak keluarga korban yang menantikan kejelasan dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada sanak-saudaranya di tahun-tahun yang lalu.

Setahun berlalu sejak Joko Widodo-Ma'aruf Amin dilantik, permasalahan HAM yang terjadi di masa lalu, hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah, contohnya saja aksi kamisan yang sudah dilakukan sejak 13 tahun sebagai salah satu cara bagi keluarga korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan kejelasan dari kasus pelanggaran HAM terhadap kerabat mereka tak kunjung mendapat jawaban. Maria Catarina Sumarsih yang merupakan salah satu penggerak Aksi Diam Kamisan berharap bahwa pemerintah, khususnya Presiden segera membuat pengadilan adhoc dan menjalankan hasil penyelidikan

⁸ Suliana Khusnulkhathimah, "Indonesia Masih Darurat Karhutla", diakses dari <https://tirto.id/indonesia-masih-darurat-karhutla-f5ig> pada 26 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB

⁹ Kristian Erdianto, "4 Tahun Presiden Jokowi, Janji Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Masih Gelap" diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/10495561/4-tahun-presiden-jokowi-janji-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu-yang?page=all> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 10.07 WIB

¹⁰ Chandar Gian Asmara, "Begini Janji Jokowi-Ma'aruf Amin Setahun Lalu, Terpenuhi?" diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201020090035-4-195565/begini-janji-jokowi-maruf-amin-setahun-lalu-terpenuhi> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 10.16 WIB

Komnas HAM. Menurut Sumarsih cara itu menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok hingga Tragedi 1965.¹¹

f. Pendekatan Militer di Papua

Militer telah berada di Papua sejak Presiden Soekarno menjabat, pada saat itu pemerintah Indonesia hendak melakukan Operasi Trikora (1961-1962). Presiden Soekarno pun berpidato bahwa ia takkan mundur sebelum Papua-waktu itu masih di bawah kekuasaan Belanda-masuk dalam teritori Indonesia. Setelah Presiden Soekarno lengser, Presiden Soeharto tetap melanjutkan operasi militer di tanah Papua tersebut. Hingga pada saat pemerintahan Habibie, pada Agustus 1998 Panglima TNI Jenderal Wiranto meminta maaf secara terbuka dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, ia mengganti nama Irian Barat dan merubahnya menjadi Papua lalu ia memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora. Pada masa pemerintahan Megawati, TNI melakukan pemindahan paksa warga di 25 kampung di Papua pada April 2003. Akibatnya 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, lalu 9 orang tewas terbunuh serta 38 orang luka berat. Peristiwa ini pun dikenal sebagai peristiwa Wamena Berdarah. Berlanjut pada pemerintahan SBY, SBY menyatakan tidak ada pendekatan yang lebih cocok di Papua selain pendekatan damai.

Namun hal tersebut bukan berarti tidak ada militer di sana, terdapat beberapa tragedi selama pemerintahan SBY tersebut seperti pada Oktober 2011 aparat TNI dan Polri menyerang Kongres Rakyat Papua III di Abepura. Selanjutnya operasi militer masih ada hingga saat ini dalam masa pemerintah Presiden Jokowi, Jokowi menerapkan operasi militer dalam rangka meneruskan proses pembangunan. Dampaknya, sampai bulan Agustus 2019, sebanyak 37 ribu warga tinggal di pengungsian akibat operasi gabungan TNI/Polri di Nduga.¹²

¹¹ Reza Gunadha, "13 Tahun Menanti Keadilan, Aksi Kamisan depan Istana Semakin Dipersulit" diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/01/16/223513/13-tahun-menanti-keadilan-aksi-kamisan-depan-istana-semakin-dipersulit?page=2> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 10.25 WIB

¹² Felix Nathaniel, "Papua di Bawah Tujuh Presiden Indonesia" diakses dari <https://tirto.id/papua-di-bawah-tujuh-presiden-indonesia-ehpY> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 11.12 WIB

g. Ketenagakerjaan

Pada saat kampanye untuk periode keduanya, Jokowi bersama pasangannya Ma'ruf Amin berjanji untuk membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional, selain itu dia juga berjanji untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja dengan cara pelatihan vokasi dan sertifikasi serta memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan keterampilan.

Selain itu untuk melindungi kaum buruh, Jokowi berjanji juga untuk meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal, mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi.¹³

Namun pada kenyatannya pemerintahan Jokowi-Ma'aruf justru membuat omnibus law terkait ketenagakerjaan tanpa melibatkan partisipasi publik, Anggota Gerakan untuk Indonesia Adil (GAID) Jeirry Sumampow menilai bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja akan menjadi peraturan yang cacat moral bila dalam pembahasannya tidak melibatkan partisipasi publik.¹⁴ Buktinya adalah terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para buruh dan warga sipil untuk mencabut UU Cipta Kerja setelah disahkannya beberapa hari sebelumnya.

h. Penanganan Pandemi COVID-19

Belum genap satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'aruf, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 pada maret lalu. Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama delapan bulan lamanya, namun negara kita belum menunjukkan tanda-tanda kurva yang melandai. Selain itu, jumlah testing yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai standar yang ditetapkan oleh WHO. WHO membuat target bahwa testing Covid-19 harus dilakukan kepada 1 per 1.000 orang setiap minggu, apabila

¹³ Ihsanuddin, "Melihat Lagi Janji Jokowi untuk Buruh Saat Kampanye Pilpres...", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/12362151/melihat-lagi-janji-jokowi-untuk-buruh-saat-kampanye-pilpres?page=all> pada tanggal 25 oktober 2020 pukul 12.34 WIB

¹⁴ Devina Halim, "Tanpa Partisipasi Publik, Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Cacat Moral", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/12154791/tanpa-partisipasi-publik-omnibus-law-cipta-kerja-jadi-cacat-moral> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 12.44 WIB

dihubungkan dengan jumlah penduduk negara kita yang sejumlah 267 juta jiwa, maka testing harus dilakukan kepada 267.000 orang per minggu atau 38.142 per hari.

Nyatanya melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah melaporkan jumlah testing Covid-19 baru mencapai 2.730.231 dan per tanggal 25 Oktober 2020 ada 18.992 orang yang diperiksa.¹⁵ Jumlah yang diperiksa tersebut memperlihatkan bagaimana jumlah testing yang dilakukan oleh pemerintah masih jauh di bawah standar WHO. Data juga menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokter yang berguguran akibat dari Covid-19 ini, per tanggal 4 Oktober yang lalu jumlah dokter yang meninggal sebanyak 130 orang, 67 merupakan dokter umum dengan 4 guru besar, dan 61 dokter spesialis 4 diantaranya guru besar dan 2 orang residen.¹⁶ Dokter yang sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi mulai berguguran serta angka testing yang di bawah standar WHO menunjukkan bahwa pemerintah belum benar-benar berhasil dalam menangani pandemi ini.

Bukan hanya dalam masalah kesehatan, pandemi juga merebak ke permasalahan lain yaitu permasalahan ekonomi. Riset yang dilakukan oleh SMERU Research Institute menunjukkan jumlah pengangguran akan meningkat sebanyak 2,3 juta orang akibat perusahaan memperkerjakan lebih sedikit orang. Angka tersebut berarti meningkatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 6,2%-6,7% dari sebelumnya hanya sebesar 4,9%.¹⁷ Dengan semakin banyaknya pengangguran maka tingkat konsumsi masyarakat akan menurun, hal ini akan berakibat pada krisis yang terjadi di Indonesia. Krisis yang sudah di depan mata ditandai dengan minus pertumbuhan ekonomi pada kuartal II sebesar -5,32% dan diperkirakan -1% hingga -2,9% pada kuartal III. Ini berarti Indonesia akan memasuki jurang resesi karena dua kuartal berturut-turut mengalami resesi.¹⁸

¹⁵ Supriatin, "Jumlah Testing Covid-19 di RI Masih Jauh di Bawah Standar WHO" diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/jumlah-testing-covid-19-di-ri-masih-jauh-di-bawah-standar-who.html?page=1> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 16.22 WIB

¹⁶ Ellyvon Pranita, "IDI:Dokter Meninggal Akibat Covid-19 bertambah 3, Capai 130 orang" diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/10/04/120100623/idi--dokter-meninggal-akibat-covid-19-bertambah-3-capai-130-orang?page=all#:~:text=Penambahan%20kematian%20tersebut%20menjadikan%20total,umum%20degan%204%20guru%20besar> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 13.08 WIB

¹⁷ Muhammad Adi Rahman, "Riset: pandemi COVID-19 menghapus 2,3 juta peluang lapangan pekerjaan" diakses dari <https://theconversation.com/riset-pandemi-covid-19-menghapus-2-3-juta-peluang-lapangan-pekerjaan-147197> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 13.25 WIB

¹⁸ Lidya Julita Sembirin, "Indonesia Masuk, Begini Ciri-ciri Resesi Ekonomi" diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201020103333-4-195598/indonesia-masuk-begini-ciri-ciri-resesi-ekonomi> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 13.33 WIB

Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf

a. Demokrasi yang Jalan di Tempat

Sebelumnya sudah kami tunjukkan data bahwa sebagian responden dari survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik dengan tajuk “Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi” setuju bahwa warga masyarakat Indonesia saat ini makin takut mengeluarkan pendapat. Sebagai salah satu bentuk kontrol atas jalannya peran pemerintah, opini maupun kritik publik seharusnya ditampung dan dijadikan bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, bukan malah membuat masyarakat menjadi takut untuk berpendapat. Berikut adalah rekomendasi bagi kebebasan berpendapat:

- 1) Pemerintah dan DPR mengevaluasi dan mencabut pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, baik itu yang ada di dalam KUHP maupun UU sektoral lainnya.
- 2) Pemerintah dan DPR harus mencabut pasal-pasal yang dapat menghambat dan mengancam kehidupan berdemokrasi, khususnya kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat serta memastikan tidak ada pasal-pasal multitafsir di dalam Rancangan Undang-Undang terutama sat ini KUHP
- 3) Mendorong pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum yang efektif terkait dengan ancaman terhadap demokrasi agar kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat tetap dapat terlindungi sesuai dengan prinsip hak-hak asasi manusia. Terutama dalam melindungi jurnalis dan menindak tegas pelaku-pelaku kekerasan terhadap jurnalis, maupun penghalangan aktivitas jurnalistik. Serta memberikan jaminan dan akses yang sama untuk meliput dan melaksanakan kerja jurnalistik di wilayah Papua, tidak terkecuali jurnalis asing
- 4) Pemerintah harus menegakkan hukum penyiaran untuk tidak dibolehkannya monopoli kepemilikan media penyiaran, karena frekuensi yang digunakan adalah milik publik, Isi siaran yang seragam, tidak bias gender atau golongan dan ketentuan lainnya.
- 5) Pemerintah wajib bertindak tegas dan memastikan perusahaan media untuk memenuhi hak dari para pekerjanya.

- 6) Pemerintah wajib menjaga dan merawat seluruh dokumen informasi publik dengan baik serta memastikan akses masyarakat terhadap dokumen publik tersebut, khususnya informasi menyangkut proses penegakan hukum dan hak asasi manusia;
- 7) Pemerintah wajib melindungi setiap pihak yang berusaha menginformasi dan membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi di badan publik dan penyelenggara negara sebagai bentuk komitmen untuk terus berupaya melakukan pemberantasan korupsi atau kasus lain yang berhubungan dengan kepentingan publik dan masyarakat luas.¹⁹

b. Kesenjangan Pendidikan

Bank Dunia dalam laporannya memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk dalam memperkecil gap ketimpangan dalam akses pendidikan di Indonesia. Berikut rekomendasinya:

a) Meningkatkan kualitas pembelajaran

Bank Dunia mencatat sebagian besar siswa Indonesia tidak belajar sebagaimana mestinya. Pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa siswa setidaknya mencapai standar minimal pembelajaran dan pengembangan diri siswa di setiap jenjang sistem pendidikan. Pembelajaran harus diarahkan dan didukung, dengan lebih menekankan untuk membantu guru dalam meningkatkan pengukuran hasil belajar dan keterampilan abad ke-21. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat mengurangi dan merevisi indikator-indikator Standar Nasional Pendidikan untuk fokus pada aspek yang terukur dan dapat diamati dalam proses pendidikan yang terkait erat dengan aspek pembelajaran.

b) Mulai lebih awal

Bank Dunia mencatat saat ini hanya 38,5 persen anak-anak usia 3-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia. Penelitian internasional menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan anak usia dini menghasilkan capaian yang tinggi secara kognitif, ekonomi, dan sosial. Pemerintah, dalam hal ini dipimpin oleh Kemendikbud dan

¹⁹ ICJR, “Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman”, diakses dari <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/> pada 26 Oktober 2020 pukul 23.22 WIB

Kementerian Agama (Kemenag) perlu mengambil langkah untuk meningkatkan akses pada pendidikan usia dini yang bermutu untuk setiap anak. Pemerintah perlu membuat kebijakan tentang program wajib belajar dua tahun pra-pendidikan dasar; dan mengembangkan roadmap untuk mencapai hal ini pada tahun 2030.

c) Meningkatkan kemampuan mengajar guru

Bank Dunia menyebutkan tanpa pengajaran yang lebih baik secara konsisten, siswa di Indonesia tidak akan memperoleh fondasi yang kuat untuk belajar di tahap selanjutnya, atau mendapatkan keterampilan kerja abad 21 dalam ekonomi yang kompetitif dan mengglobal. Pemerintah dapat memastikan bahwa Indonesia memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan, khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya. Ada 55 persen guru PNS (sekitar 960.000 guru) yang akan pensiun dalam 10 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2018. Saat merekrut guru baru, pemerintah hendaknya hanya menyeleksi calon guru yang berkualifikasi tinggi dengan pengetahuan yang baik terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan. Entah itu sebagai pegawai negeri ataupun guru kontrak dan guru honorer, serta mengujicobakan berbagai cara yang bisa meningkatkan akuntabilitas guru.

d) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja

Bank Dunia mencatat Indonesia memiliki kondisi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan juga rendahnya daya saing secara keseluruhan. Dengan bekerja sama lintas kementerian, pemerintah dapat memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan / vokasi (TVET) dan pendidikan tinggi. Hal ini akan membangun sebuah struktur tata kelola untuk memandu sistem pengembangan keterampilan secara menyeluruh dengan melibatkan sektor swasta, dan menetapkan prioritas dalam hal kebutuhan pasar tenaga kerja dan harapan di masa depan.

e) Mengelola pendidikan untuk peningkatan kinerja

Bank Dunia melihat adanya kendala kapasitas membatasi potensi dampak dari manajemen berbasis sekolah dan peran serta masyarakat pada sekolah di bawah Kemdikbud dan Kemenag, terutama di daerah berpenghasilan rendah dan pedesaan. Pemerintah dapat meminta

pertanggungjawaban pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menetapkan Indeks Kualitas Pendidikan. Data dari indeks dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan bantuan langsung kepada kabupaten dan sekolah tertinggal.²⁰

c. Isu Agraria

Beberapa rekomendasi terkait penyelesaian konflik agraria yang perlu segera dilakukan; pertama, menyangkut penataan di bidang peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian konflik agraria, mulai UU, PP, perda, sampai dengan surat keputusan bupati. Kedua, adanya peran serta semua pihak, yaitu pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan, pemda, serta pemimpin informal/ketua-ketua masyarakat hukum adat. Ketiga, pemda berlaku sebagai mediator independen (tidak memihak).

Keempat, DPRD berkomitmen kuat untuk membantu masyarakat. Kelima, buka saluran keluhan warga sebelum terjadi konflik. Keenam, para pihak harus membangun komunikasi yang intensif. Ketujuh, sosialisasi dan monitoring kesepakatan. Kedelapan, pilihan kompensasi yang bersifat sustainable. Kesembilan, akses masyarakat terhadap tanah dan sumber daya tidak putus. Ke-10, perlu ada pemahaman dan pengetahuan yang setara mengenai hukum di antara para pihak. Ke-11, keputusan diambil secara sukarela dan tidak dimanipulasi. Ke-12, mediator memahami sosiobudaya masyarakat setempat. Ke-13, identifikasi sumber, aktor, dan cakupan konflik/sengketa.

Selain aspek-aspek pendukung penyelesaian konflik di atas, yang penting ialah bukan caranya, melainkan pemahaman tentang sumber, asas ketentuan, serta penerapan asas dan ketentuan tersebut dalam menyelesaikan konflik/sengketa. Selanjutnya, kebijakan dan produk hukum pertanahan di kabupaten/kota yang bersifat lintas sektoral dan partisipatif harus dikaji

²⁰ Kompas.com, "5 Rekomendasi Bank Dunia untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia", diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2019/11/22/22064901/5-rekomendasi-bank-dunia-untuk-peningkatan-kualitas-pendidikan-indonesia?page=all>, pada 26 Oktober 2020 pukul 23.40 WIB

ulang secara berkala. Semua itu dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah, dan prinsip keadilan.²¹

d. KARHUTLA

Dalam Rapat Khusus Tingkat Menteri untuk Antisipasi Karhutla Periode Puncak Tahun 2020 di Jakarta, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya terus mencari solusi atas permasalahan karhutla yang terus muncul tiap tahun. Salah satunya adalah dengan pengelolaan lahan gambut secara benar.

"Sejak 2015 ketika masa sulit Karhutla, kita sudah lakukan operasi pengendalian seperti pembentukan satgas, pelaksanaan operasi terpadu, pelibatan MPA, pembangunan posko-posko lapangan, dan penegakan hukum. Itu satu rumpun penyelesaian dari pola pengendalian operasional. Unsur lainnya analisis iklim, cuaca dan modifikasi teknologi," ujar Siti.

Hal yang sedang dan harus diselesaikan segera adalah pengelolaan landscape, untuk semakin memantapkan tata kelola gambut secara benar, termasuk pengerjaan *land clearing* menggunakan sistem pertanian tradisional dengan bentuk kearifan lokal yang masih perlu terus dieksplorasi.

Di sisi lain, manajemen lapangan harus terkonsolidasi, terkoordinasi dengan baik untuk memonitor area-area yang rawan hotspot dan update informasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk monitoring.

Sementara itu, Direktur SIIA Simon Tay mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam menangani karhutla pasca kebakaran hebat di tahun 2015 silam. "Faktanya, saya dapat katakan bahwa mereka menganggap ini sangat serius," papar Simon.²²

e. Penyelesaian Permasalahan HAM di Masa Lalu

²¹ Aartje Tehupeiory, "Penyelesaian Konflik Agraria", diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/249995-penyelesaian-konflik-agraria> , pada 26 Oktober 2020 pukul 23.17 WIB

²² DW, "Ancaman Karhutla di Tengah Pandemi COVID-19", diakses dari <https://www.dw.com/id/ancaman-karhutla-di-tengah-pandemi-covid-19/a-54078564> , pada 27 Oktober 2020 pukul 23.12 WIB

Dalam isu pelanggaran HAM di masa lalu, Pemerintah Indonesia seharusnya dapat menggunakan dokumen dari tim pencari fakta (TPF) untuk mengurut kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, namun faktanya dokumen TPF dari kasus pelanggaran HAM yaitu kasus Munir hilang, hilangnya dokumen tersebut baru diketahui pada pertengahan Februari 2016 ketika KontraS memenangkan gugatan terhadap Kemensetneg.²³

Jika dokumen untuk mengungkap satu pelanggaran HAM yang terjadi saja hilang, bukan tidak mungkin dokumen untuk mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi sebelum kasus Munir juga turut hilang (atau sengaja dihilangkan). Pemerintah apabila memang benar-benar ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi, dapat segera mengungkapkan dokumen-dokumen terdahulu tentang pelanggaran HAM yang terjadi lalu menyelenggarakan pengadilan Ad Hoc HAM untuk kasus sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan kata lain, pengadilan Ad Hoc HAM dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu²⁴ seperti kasus pelanggaran HAM pada tahun 1998 dan 1965.

f. Pendekatan Militer di Papua

Pemerintah Indonesia di masa yang sekarang yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin seharusnya melakukan pendekatan keamanan manusia. Pemerintah harus mengutamakan keselamatan warga yang tidak terlibat dalam konflik yang terjadi di Papua tanpa membeda-bedakan suku dan ras antara penduduk asli dan pendatang. Pemerintah Indonesia pun harus membangun dialog serta negosiasi menuju rekonsiliasi serta bekerja sama dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah lebih proaktif agar dapat bekerja sama dengan aparat dalam mengembalikan dan menciptakan kembali suasana yang kondusif.²⁵

²³ Dewi Nurita, "Perjalanan Kasus Hilangnya Dokumen TPF Munir" diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1268805/perjalanan-kasus-hilangnya-dokumen-tpf-munir/full&view=ok> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 10.38 WIB

²⁴ Bilal Dewansyah, "Hakim Ad Hoc adalah Pejabat Negara" diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d60f02e2b5c/hakim-ad-hoc-adalah-pejabat-negara/> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 10.49 WIB

²⁵ Adriana Elisabeth, "Memahami akar masalah Papua dan penyelesaiannya: jangan gegabah" diakses dari <https://theconversation.com/memahami-akar-masalah-papua-dan-penyelesaiannya-jangan-gegabah-87785> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 11.18 WIB

g. Ketenagakerjaan

Sejak disusunnya, RUU Cipta Kerja (yang telah disahkan menjadi UU) tidak melibatkan partisipasi publik. Partisipasi publik dalam hal ini adalah serikat-serikat buruh. Penyertaan partisipasi publik dalam penyusunan Undang-Undang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan kebijakan publik tersebut.

Pelibatan publik dalam mewujudkan pelayanan publik merupakan hak masyarakat untuk ikut serta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Ketika pemerintah ingin mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas maka tidak cukup hanya diawasi oleh pengawas internal, tetapi pemerintah perlu pengawasan eksternal tidak hanya dari Ombudsman tetapi dari rakyat sendiri.²⁶ Maka sejatinya partisipasi publik merupakan langkah awal agar Presiden Jokowi mampu menepati janji saat melakukan kampanye yang lalu.

h. Penanganan Pandemi COVID-19

Pemerintah Indonesia seharusnya dapat memperbanyak jumlah testing sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh WHO sembari menunggu ditemukannya vaksin yang saat ini di beberapa negara telah masuk uji klinis tahap III. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga perlu memperluas bantuan terhadap perusahaan-perusahaan untuk membantu operasional mereka, bantuan yang pemerintah Indonesia berikan kiranya harus tepat sasaran.

²⁶ Sabarudin Hulu, "PARTISIPASI MASYARAKAT, MENCEGAH MALADMINISTRASI" diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--partisipasi-masyarakat-mencegah-maladministrasi> pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 12.59 WIB

SIKAP BEM USD

Maka dari itu, berdasarkan uraian komprehensif di atas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma melalui Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis 2020 menyatakan sikap untuk:

1. Mendorong pemerintah Indonesia untuk serius dalam menangani permasalahan urgensi bangsa, seperti pandemi Covid-19 dengan meningkatkan *testing* dan mematangkan rencana vaksinasi massal
2. Mendorong pemerintah Indonesia untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat dalam mengemukakan pendapat sesuai amanat Undang-Undang agar terciptanya masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan bangsa
3. Mendukung Kabinet Indonesia Maju untuk menyelesaikan semua permasalahan dan isu kebangsaan, terutama ketimpangan dalam akses pendidikan yang layak

